

IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH

(Studi Eksplanasi Tentang Proses Implementasi
Kebijaksanaan Retribusi Ijin Dispensasi Angkutan
Di Kotamadya Daerah Ringkat II Surabaya)

SKRIPSI



KIC

Fis. An. 105/97

Hid

i

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

DISUSUN OLEH :

MOCH. MANSUR HIDAYAT

NIM. 079113220

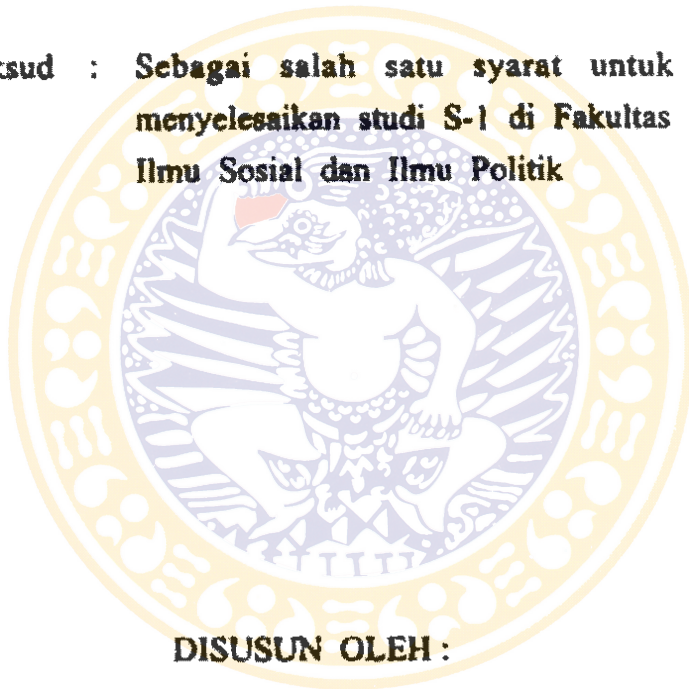
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP 1996/1997**

IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH

**(Studi Eksplanasi Tentang Proses Implementasi
Kebijaksanaan Retribusi Ijin Dispensasi Angkutan
Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya)**

SKRIPSI

**Maksud : Sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi S-1 di Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



DISUSUN OLEH :

MOCH. MANSUR HIDAYAT

NIM. 079113220

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP 1996/1997**

HALAMAN PERSETUJUAN

TELAH SETUJU UNTUK DIUJIKAN

SURABAYA, 23 JUNI 1997

DOSEN PEMBIMBING

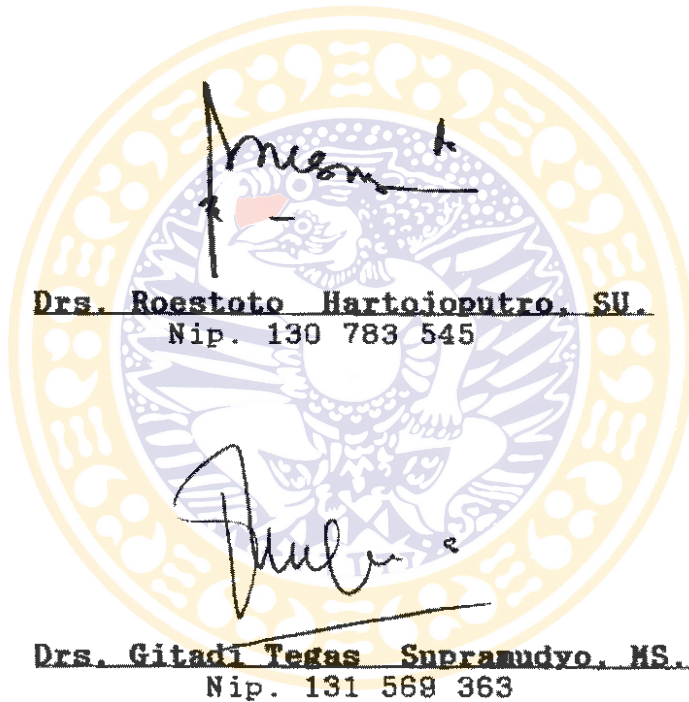



(Drs. GITADI TEGAS SUPRAMUDYO. MS)
Nip. 131 569 363


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
panitia penguji pada tanggal 2 Juli 1997

Panitia Penguji terdiri dari :




Drs. Roestoto Hartoioptoro, SU.
Nip. 130 783 545


Drs. Gitadi Tegas Supramudyo, MS.
Nip. 131 568 363


Drs. Bintoro Wardiyanto, MSi.
Nip. 131 801 405

ABSTRAK

Perkembangan wilayah perkotaan yang cukup pesat menjadikan kota sebagai pusat konsentrasi segala sendi kehidupan masyarakat. Perkembangan ini juga diikuti oleh meningkatnya kebutuhan dan penggunaan prasarana fisik, salah satunya adalah jalan Raya. Tentu saja dengan tingkat penggunaan yang tinggi, maka prasarana jalan raya rentan mengalami kerusakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi geografis Surabaya yang berada di dataran rendah. Hal ini menyebabkan pemerintah kota perlu memikirkan upaya-upaya pembatasan penggunaan dan pembiayaannya.

Untuk itu, pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 1983, Jo. Perda No. 8 tahun 1991 tentang Retribusi Ijin Dispensasi Angkutan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk sistem Pelayanan Satu Atap yang merupakan pelaksana dari lingkungan Pemerintah sendiri. Serta menjalin hubungan kerja sama dengan pihak swasta.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana proses pelaksanaan kebijaksanaan pemungutan retribusi IDA diberlangsungkan serta faktor-faktor penyebab timbulnya berbagai kendala sehingga mampu mempengaruhi proses pelaksanaannya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dibuat suatu kerangka pemikiran berlandaskan beberapa teori kebijaksanaan negara dan implementasi kebijaksanaan yang memiliki kesesuaian dengan konteks penelitian. Dalam penelitian ini akhirnya diputuskan untuk menggunakan variabel yang telah dikembangkan Edwards dan dianggap kritis untuk dicermati, antara lain struktur birokrasi lembaga pelaksana, komunikasi, sikap pelaksana, dan sumber daya. Selain itu dilengkapi dengan variabel dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi kebijaksanaan yang telah dikembangkan Mazmanian dan Sabatier serta Grindle.

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi yang bertujuan bukan hanya mendeskripsikan proses pelaksanaan pemungutan retribusi IDA, tetapi juga menjelaskan penyebab timbulnya hambatan-hambatan atau kendala yang ada didalamnya. Pengambilan sample dilakukan secara *logical-purposive sampling*. Data yang digunakan merupakan data primer hasil wawancara yang berpedoman pada *guide interview* serta data sekunder berupa dokumentasi dan hasil observasi lapangan. Dengan menggunakan tehnik validitas data berupa perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan serta triangulasi, maka data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Pada penelitian ini, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa para pelaksana kebijaksanaan retribusi Ijin Dispensasi Angkutan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah berhasil melaksanakan tugasnya jika dilihat dari kemampuannya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tetapi jika argumentasi yang digunakan untuk menelaah pelaksanaannya didasarkan pada proses, maka sesungguhnya implementasi kebijaksanaan retribusi IDA masih diwarnai banyak kekurangan dan kelemahan sehingga mengganggu proses implementasi.

Faktor-faktor yang mampu menimbulkan kendala-kendala tersebut adalah munculnya nepotisme dan penyusupan dalam proses kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta, kurang jelas dan terperinci aturan formal yang mengatur proses implementasi serta hubungan antar organisasi pelaksana yang kurang dirumuskan secara cermat. Semua itu terangkum dalam variabel struktur birokrasi. Melalui variabel komunikasi ditemukan bahwa proses pengiriman arahan dan perintah, walau tidak dilakukan secara rutin, tetapi mampu diterima secara jelas dan konsisten oleh para pelaksana. Mengenai sikap para pelaksana, ternyata *agreement* terhadap kebijaksanaan masih belum mampu menjadi basis psikologis untuk memunculkan kepatuhan, terutama bagi pihak swasta. Sedangkan mengenai sumber daya, terlihat bahwa para pelaksana telah memiliki kecukupan aparat baik ditinjau dari jumlah maupun kompetensinya. Begitu pula untuk sumber dana. Tetapi terdapat perbedaan mengenai kewenangan, dimana aparat pelaksana dari lingkungan pemerintah terlihat masih sangat kurang, sementara pelaksana dari pihak swasta mengalami pembengkakan kewenangan, walau kewenangan ini tidak didasari oleh legitimasi legal formal. Sebaliknya untuk fasilitas fisik, terlihat pelaksana dari lingkungan pemerintah sudah mencukupi, sedangkan pihak swasta masih kurang sehingga seringkali timbul kemacetan arus lalu lintas ketika kelompok sasaran membayar retribusi melalui pos-pos pemungutan. Terakhir, kelompok sasaran memandang bahwa besarnya biaya retribusi kurang memuat keadilan. Selain itu manfaatnya kurang mereka rasakan secara langsung. Tetapi dengan kemampuan kebijaksanaan untuk dipaksakan secara formal, menyebabkan ketidakpatuhan kelompok sasaran yang mungkin muncul dapat ditekan.